



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2021**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang menyusun Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu :

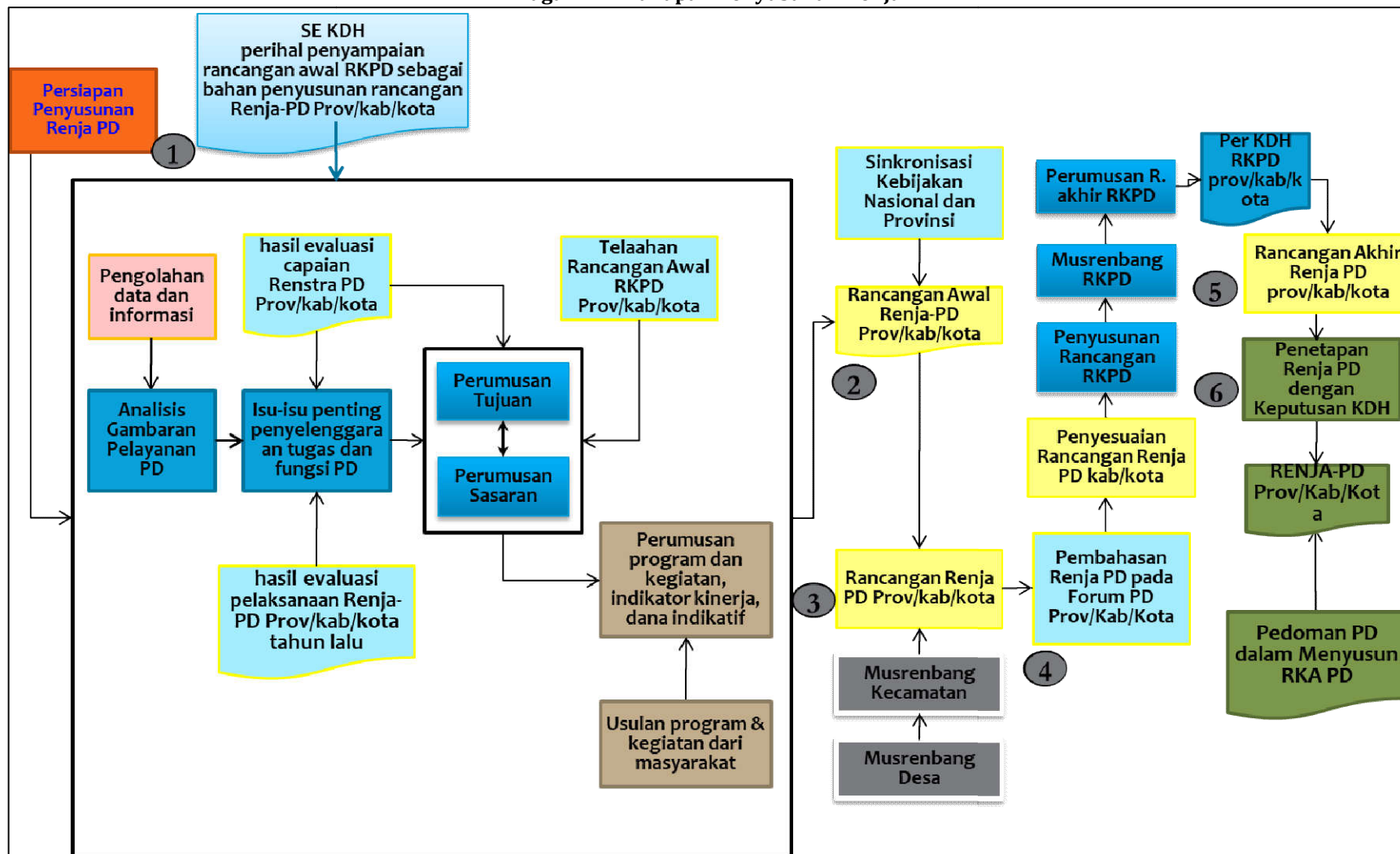
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2022.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah dan Kehidupan Masyarakat melalui Penguatan Kontribusi Sektor Unggulan, Kesehatan dan Infrastruktur Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Menurunnya Jumlah PMKS”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2020 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2021 secara umum adalah :

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;

3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2020 dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2024.

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Dinas Sosial.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020 Anggaran Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebesar Rp. 6.590.104.493,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.207.406.098,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.382.698.395,00. Dengan total realisasi sebesar Rp. 5.605.903.624,00 (85,07%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.744.544.821,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.861.358.803,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program dan 24 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang

No.		Alokasi Biaya			Indikator			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
A	Belanja Tidak Langsung (BTL)	3.207.406.098,00	2.744.544.821,00	85,57%	Gaji dan Tunjangan	14 bulan	14 ok	100%
B	Belanja Langsung (BL)	3.382.698.395,00	2.861.358.803,00	84,59%				
	Sasaran				Presentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.500 surat	1412 surat	94%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	435.851.715	402.260.868	92,29%				
	Pelayanan Administrasi	319.884.515	288.496.588	90,19%				

dan Jasa Perkantoran					Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12 bulan	12 bln	100%
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	18 kendaraan	17 kendaraan	94%
					Jumlah tenaga kebersihan	12 bln	12 bulan	100%
					Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 bln	11 bulan	92%
					Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	14 bln	12 bulan	86%
					Cakupan pemenuhan bahan bacaan	388 exp	388 exp	100%
	Penyedia Sarana Administrasi Perkantoran	80.217.200	78.725.350	98,14%	Jumlah alat tulis kantor	29 jenis	29 jenis	100%
					Jumlah barang cetakan	12 jenis	12 jenis	100%
					Jumlah barang penggandaan	15.000 lbr	15.000 lbr	100%
					Jumlah komponen instalasi listrik	1 pkt	1 pkt	100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	35.750.000	35.038.930	98,01%	Jumlah koordinasi dalam daerah	12 kl	12 kl	100%	
				Jumlah koordinasi luar daerah	9 kl	7 kl	78%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	212.427.800	198.293.866	93,35%	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik				
Pembangunan /Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	22.700.000	22.335.000	98,39%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 pkt	3 pkt	75%	
Pengadaan/Peeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	77.827.800	66.371.421	85,28%	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	5 unit	100%	
Pengadaan/Peeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	111.900.000	109.587.445	97,93%	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 pkt	1 pkt	100%	

					Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 unit	5 unit	100%
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	2 unit	2 unit	100%
					Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	20 jenis	20 jenis	100%
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.000.000	5.850.000	83,57%	Persentase Aparatur yang mengikuti kapasitas sumber daya aparatur			
	Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/ Seminar	7.000.000	5.850.000	83,57%	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/ seminar	1 ok	1 ok	100%
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan , Penganggaran, Pelaporan, dan Pelayanan Informasi	28.567.025	18.527.425	64,86%	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	11.080.650	8.731.150	78,80%	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 dok	6 dok	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9.986.375	9.796.275	98,10%	Dokumen RKA, DPA, RENJA, RPJMD, dan Renstra	4 dok	4 dok	100%
	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	7.500.000	0	0,00%	Jumlah Dokumen SKM	1 dok	0 dok	0%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	390.971.955	343.905.026	87,96%	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial			
	Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	3.952.650	3.590.000	90,83%	Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	1 keg	0 kl	0%
	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	1.050.000	950.000	90,48%	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	30 org	0 org	0%
					Jumlah Penyandang Tuna Sosial yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	14 org	0 org	0

Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	25.732.000	19.217.750	74,68%	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	27 org	0 org	0
Pelayanan psikososial bagi PMKS	353.402.605	315.577.276	89,30%	Jumlah Korban Psikososial yang tertangani	566 org	177 org	31%
Pendataan PMKS dan PSKS	6.834.700	4.570.000	66,86%	Data PMKS dan PSKS	1 dok	1 dok	100%
Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	1.003.026.475	763.767.700	76,15%	Persentase Fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial			
Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	0	0	0,00%	Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	60 orang	0 org	0%
Fasilitasi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	224.248.000	146.512.500	65,34%	Jumlah peringatan hari besar nasional dan TMP	4 keg	6 keg	150%
					2 paket	0 pkt	0%
Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial	114.376.725	100.845.200	88,17%	Jumlah Lembaga yang dibina	2 lembaga	5 lembaga	250%
Fasilitasi Bantuan Sosial bagi keluarga miskin	300.839.000	213.683.000	71,03%	Jumlah RTSM penerima Raskin/Rastra	130.080 orang	130.074 org	100%
Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN	363.562.750	302.727.000	83,27%	Data BDT dan PBI JKN	1 dok	1 dok	100%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.304.853.425	1.128.753.918	86,50%	Persentase PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
Fasilitasi dan penanganan korban bencana alam	303.830.000	247.016.788	81,30%	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	50 orang	45 org	90%
Fasilitasi dan penanganan korban bencana sosial	101.782.875	86.072.714	84,57%	Jumlah Korban Bencana Sosial yang dibantu	72 orang	56 org	78%
Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah	605.695.500	559.730.850	92,41%	Jumlah UPPKH Kabupaten yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH	234 orang	234 org	100%

Kesejahteraan Sosial (PMKS)								
Pengelolaan rumah singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin	293.545.050	235.933.566	80,37%	Jumlah hunian penderita yang dapat ditampung	2.920 orang	2.111 org	72%	

sedangkan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 349.441.000,00 yang terdiri dari Belanja Langsung. Dengan total realisasi sebesar Rp. 343.308.883,00 (98,25%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program dan 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No.		Alokasi Biaya			Indikator			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
A II	Belanja Langsung (BL) Sasaran	349.441.000,00	343.308.883,00	98,25 %				
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	349.441.000	343.308.883	98,25 %	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak	30		
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Hak-hak Anak	60.682.000	57.763.933	95,19 %	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	100		
					Jumlah Dokumen Penghitungan IPG	5 dok	0 dok	0%
					Jumlah Dokumen Profil Anak	5 dok	5 dok	100%
					Jumlah Forum Anak yang terbentuk	2 kec	2 kec	100%
					Jumlah Forum Anak yang mendapatkan pelatihan	40 org	40 org	100%
					Jumlah Kecamatan yang Deklarasi menjadi kecamatan layak anak	5 bln	0 bln	0%
					Jumlah forum anak yang reorganisasi	12 kec	0 kec	0%
	Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak	250.059.000	249.722.400	99,87 %	Jumlah Tindakan Visum	30 tindakan	23 tindakan	77%

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	38.700.000	35.822.550	92,56 %	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi	84 org	0 org	0%
				Honor Tim Teknis Konseling P2TP2A	22 org	22 org	100%
				Penyuluhan Stop 3 Kekerasan kepada masyarakat	75 org	0 org	0%
				Jumlah tim teknis yang mendapatkan pelatihan	25 kl	0 kl	0%
				manajemen kasus			
				Jumlah penyuluhan langsung kepada masyarakat/lembaga	540 org	540 org	100%
				pendidikan tentang pencegahan kekerasan oleh tim teknis			
				konseling P2TP2A			
				Jumlah siswa yang mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan pada anak	400 org	0 org	0%
				Jumlah konseling korban kekerasan	40 kl	40 kl	100%
Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan dan evaluasi P2WKSS	300 kader	0 kader	0%				
Jumlah Organisasi perempuan yang mendapat pembinaan (Forum PUSPA)	50 organisasi perempuan	50 organisasi perempuan	100%				
Jumlah perempuan yang tergabung dalam PEKKA dan mendapatkan bimbingan manajemen Usaha	50 PEKKA	50 PEKKA	100%				

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 91,66 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2020

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Tujuan :											
	Menurunnya Jumlah PMKS		1. Persentase PMKS	%	8,27	8,77	8,90	9,07	98,09	8,87	115,73	13,99
	Sasaran:											
	Menurunnya Jumlah PMKS		1. Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	4,47	1,77	3,1	69,64	2246,45	3,78	2.252	503, 80
1.06		URUSAN SOSIAL										
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial	%		-	3,78	-	-	2,77		
		Kegiatan Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	1. Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	Orang		-	30	0	-	50	50	0
		Kegiatan Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	1. Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	Orang		-	20	-	-	20		
		Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	1. Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	Orang		-	37	-	-	37		

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2021	Prkiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS	1	Jumlah Korban Psikososial yang tertangani	orang	-	-	2190	-	-			
		Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS	1	Data PMKS dan PSKS	dok	-	-	1	-	-			
		Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	1	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	%	-	-	39,31	-	-			
		Kegiatan Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	1	Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	Orang	-	-	40	-	-			
		Kegiatan Fasilitasi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	1	Jumlah peringatan hari besar nasional dan TMP	Kegiatan	-	-	8	-	-			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	1	Jumlah Lembaga yang dibina	Lembaga	-	-	14	-	-			
		Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin	1	Jumlah RTSM penerima Raskin/Rastra	Orang	-	-	130.080	-	-			
		Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN	1	Data BDT dan PBI JKN	dok	-	-	1	-	-			

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2021	Prkiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Menurunnya Jumlah PMKS	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	13,42	-	-	-	-	-
		Kegiatan Fasilitasi dan Penanganan Korban Bencana Alam	1	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	Orang	-	-	3750	-	-	-	-	-
		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Jumlah UPPKH kabupaten yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH	Orang	-	-	14	-	-	-	-	-
		Kegiatan Pengelolaan Rumah Singgah bagi Pendamping Penderita Rujukan Keluarga Miskin	1	Jumlah Hunian Penderita yang dapat ditampung	Orang	-	-	7300	-	-	-	-	-
		Program Pelayanan Administrasi Dan Jasa Perkantoran	1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pekantoran	%	-	-	100	-	-	-	-	-
		Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah Surat yang Dikirim	Surat	-	-	100	-	-	-	-	-
			2	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air,dan Komunikasi	Bulan								
			3	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	Kendaraan								

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2021	Prkiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			4	Jumlah Tenaga Kebersihan	Bulan								
			5	Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan	Bulan								
			6	Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis	Bulan								
		Kegiatan Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	Paket		-	100	-	-		-	-
			2	Jumlah Barang Cetak	paket								
			3	Jumlah Brang Pengandaan	bulan								
			4	Jumlah Komponenn Instalasi listrik	paket								
			5	Cakupan Pemenuhan Bahan Bacaan	bulan								
			6	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	Orang								
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	1	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	kali		-	100	-	-		-	-
			2	Jumlah Koordinasi Luar Daerah	kali								
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%		-	100	-	-		-	-
		Kegiatan Pembangunan/Rehab /Pemeliharaan	1	Jumlah Gedung Kntor Yang Di Bangun	paket		-	100	-	-		-	-

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Gedung Kantor											
			2	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	paket								
		Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah Kendaraan Dinas R2 yang Diadakan	unit		-	100	-	-		-	-
			2	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang Di pelihara	unit								
			3	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	unit								
			4	Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul /Bendera yang Disediakan	jenis								
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Presentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	%		-	100	-	-		-	-
		Kegiatan Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi/Seminar	1	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek / Sosialisasi /Seminar	org		-	100	-	-		-	-
		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Persentase Penyusunan Laporan Caapaian Kinerja Dan Keuangan Yang Baik Dan Tepat Waktu	%		-	100	-	-		-	-
		Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan	1	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan ,Laporan Semester ,Laporan Akhir Tahun ,CALK , LKJIP	dok		-	100	-	-		-	-

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2021	Prkiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	1	Dokumen Renstra, Renja , RKA ,DPA	dok		-	100	-	-		-	-
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah Dokumen SKM	dok		-	100	-	-		-	-
			2	Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah									

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja Tahun 2020, dikarenakan Periode Resntra Dinas Sosial adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang dapat dinilai hanya Tahun 2019 saja;
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2020 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena adanya perubahan pada Nomenklatur Dinas Sosial yang baru.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisa
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
1	Presentase PMKS				-	9,47	9,27	9,07	-	8,77	-	-	
a.	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				-	2,45	3,10	3,78	-	1,77	-	-	
1	Presentase PMKS				-	9,47	9,27	9,07	-	8,77	-	-	
a.	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				-	2,45	3,10	3,78	-	1,77	-	-	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang merupakan salah satu institusi penyelenggara kesejahteraan sosial, Perempuan dan Anak yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) disebutkan, “ Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi

kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial “

Sebagaimana termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Melakukan Pendataan terhadap PMKS**
2. **Memberikan bantuan dan Pelatihan pada PMKS**

2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 **Peningkatan Kemampuan PMKS melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan dan penguatan Lembaga – lembaga yang menangani PMKS**

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS SOSIAL TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
1.06.	URUSAN SOSIAL				6.154.465.803	URUSAN SOSIAL				6.154.465.803
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	480.129.500	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran		480.129.500
1.06.1.06.01.01.01	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Dinas Sosial	a. Jumlah Surat yang Dikirim	2000 surat	235.234.580	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Dinas Sosial	a. Jumlah Surat yang Dikirim	2000 surat	235.234.580
			b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik ,Air,dan Komunikasi	12 bulan	-			b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik ,Air,dan Komunikasi	12 bulan	-
			c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	18 unit	-			c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	18 unit	-
			d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	1 paket	-			d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	1 paket	-
			e. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	84 orang	-			e. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	84 orang	-
			f. Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis	14 bulan	-			f. Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis	14 bulan	-
			g. Cakupan pemenuhan bahan bacaan	866 ok	-			g. Cakupan pemenuhan bahan bacaan	866 ok	-
1.06.1.06.01.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Dinas Sosial	a. Jumlah ATK	12 Paket	104.328.380	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Dinas Sosial	a. Jumlah ATK	12 Paket	104.328.380
			b. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 Paket	-			b. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 Paket	-
			c. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	2 bh	-			c. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	2 bh	-
			d. Jumlah barang cetakan	12 paket	-			d. Jumlah barang cetakan	12 paket	-
			e. Jumlah barang penggandaan	22.201 lbr	-			e. Jumlah barang penggandaan	22.201 lbr	-
			f. Jumlah komponen instalasi listrik	12 bulan	-			f. Jumlah komponen instalasi listrik	12 bulan	-

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS SOSIAL TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
			g. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	12 bulan				g. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	12 bulan	
1.06.1.06.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Sosial	a. Jumlah koordinasi dalam daerah	22 kali	138.434.500	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Sosial	a. Jumlah koordinasi dalam daerah	22 kali	138.434.500
			b. Jumlah koordinasi luar daerah	39 kali	-			b. Jumlah koordinasi luar daerah	39 kali	-
1.06.1.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	359.750.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	382.595.095
1.06.1.06.01.02.01.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinas Sosial	a. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	104.999.875	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinas Sosial	a. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	104.999.875
1.06.1.06.01.02.03.	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	Dinas Sosial	a. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 unit	136.621.550	Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	Dinas Sosial	a. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 unit	136.621.550
1.06.1.06.01.02.04.	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor	3 Unit	140.973.670	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor	3 Unit	140.973.670
			b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	-			b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	-
			c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 unit	-			c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 unit	-
1.06.1.06.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	25.900.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	25.900.000
1.06.1.06.01.03.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Dinas Sosial	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	4 Orang	25.900.000	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Dinas Sosial	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	4 Orang	25.900.000
1.06.1.06.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	45.000.000	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	44.999.875

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS SOSIAL TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
1.06.1.06.01.04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 Dok	15.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 Dok	15.000.000
1.06.1.06.01.04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 Dok	14.999.875	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 Dok	14.999.875
1.06.1.06.01.04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Dinas Sosial	a. Jumlah Dokumen SKM	1 Dok	15.000.000	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Dinas Sosial	a. Jumlah Dokumen SKM	1 Dok	15.000.000
			b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	1 kali				b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	1 kali	
1.06.1.06.01.15.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	2,76	1.453.298.750	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	2,76	1.150.374.105
1.06.1.06.01.15.01.	Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	Anak terlantar dan Lansia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	30 orang	379.235.000	Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	Anak terlantar dan Lansia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	30 orang	379.235.000
1.06.1.06.01.15.02.	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Penyandang Tuna Sosial yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	14 orang	150.350.000	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Penyandang Tuna Sosial yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	14 orang	150.350.000
1.06.1.06.01.15.03	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	27 orang	145.289.000	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	27 orang	145.289.000
1.06.1.06.01.15.04	Pelayanan psikososial bagi PMKS	PMKS Kab. Sampang	Jumlah Korban Psikososial yang tertangani	566 orang	447.820.105	Pelayanan psikososial bagi PMKS	PMKS Kab. Sampang	Jumlah Korban Psikososial yang tertangani	566 orang	447.820.105
1.06.1.06.01.15.05	Pendataan PMKS dan PSKS	Dinas Sosial	Data PMKS dan PSKS	1 dokumen	27.680.000	Pendataan PMKS dan PSKS	Dinas Sosial	Data PMKS dan PSKS	1 dokumen	27.680.000
1.06.1.06.01.16.	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial		Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	39,31	1.525.588.750	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial		Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	39,31	1.933.847.818

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS SOSIAL TAHUN 2020					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
1.06.1.06.01.16.01.	Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	60 orang	246.503.093	Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	60 orang	246.503.093	
1.06.1.06.01.16.02.	Fasilitasi kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah peringatan hari besar nasional dan TMP	4 Keg dan 2 Paket	472.150.000	Fasilitasi kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah peringatan hari besar nasional dan TMP	4 Keg dan 2 Paket	453.650.000	
1.06.1.06.01.16.03.	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Lembaga yang dibina	8 Lembaga	255.811.725	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Lembaga yang dibina	8 Lembaga	255.581.725	
1.06.1.06.01.16.04.	Fasilitasi Bantuan Sosial bagi keluarga miskin	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah RTSM penerima Raskin/Rastra	130.080 orang	763.809.000	Fasilitasi Bantuan Sosial bagi keluarga miskin	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah RTSM penerima Raskin/Rastra	130.080 orang	457.554.000	
1.06.1.06.01.16.05.	Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN	Masyarakat Kab. Sampang	Data BDT dan PBI-JKN	1 Dokumen	520.559.000	Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN	Masyarakat Kab. Sampang	Data BDT dan PBI-JKN	1 Dokumen	520.559.000	
1.06.1.06.01.17.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	4,55	2.274.994.213	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	4,55	2.042.751.450	
1.06.1.06.01.17.01.	Fasilitasi dan penanganan korban bencana alam	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	6000 orang	550.150.000	Fasilitasi dan penanganan korban bencana alam	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	6000 orang	550.150.000	
1.06.1.06.01.17.02.	Fasilitasi dan penanganan korban bencana sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Korban Bencana Sosial yang dibantu	72 orang	213.558.900	Fasilitasi dan penanganan korban bencana sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Korban Bencana Sosial yang dibantu	72 orang	213.558.900	
1.06.1.06.01.17.03	Penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah PPKH kabupaten yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH	234 orang	808.929.250	Penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah PPKH kabupaten yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH	234 orang	808.929.250	
1.06.1.06.01.17.04.	Pengelolaan rumah singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin	Surabaya	Jumlah Hunian Penderita yang dapat ditampung	3.650 orang	470.113.300	Pengelolaan rumah singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin	Surabaya	Jumlah Hunian Penderita yang dapat ditampung	3.650 orang	470.113.300	
TOTAL					6.154.465.803	TOTAL					6.154.465.803

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2021.

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yaitu dari kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2020

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Dinas Sosial pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (**RKP**) Tahun 2020 dengan Tema “**Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas**”.

Dinas Sosial sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Sosial dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2020

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 1 : Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja	Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial pada Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2020

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2020
	Tujuan:			
	Menurunnya jumlah PMKS	1	Presentase PMKS	9,27
	Sasaran:			
1	Menurunnya jumlah PMKS	1	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,10

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2020

Dalam merumuskan program kegiatan Dinas Sosial mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Dinas Sosial mendukung pada pencapaian **misi 1** yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Sosial dan tugas pemabntuan. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024, Dinas Sosial Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 1 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”**.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat, Trauma dan Ex Penyandang Masalah Sosial;
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- Program Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial.

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2020 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 pada sistem aplikasib<https://e-planning.sampangkab.go.id/>.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial mengampu urusan Unsur Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Program-program Dinas Sosial pada Tahun 2020 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 1. “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Tahun 2020**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Sosial	32 ASN	3.058.681.775
	Belanja Langsung (BL)			6.502.108.500
1.06.	URUSAN SOSIAL			
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial	2,76 %	1.150.374.105
	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	30 orang	379.235.000
	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial	Jumlah Penyandang Tuna Sosial yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	14 orang	150.350.000
	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	27 orang	145.289.000
	Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS	Jumlah Korban Psikososial yang tertangani	566 orang	447.820.105
	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS	Data PMKS dan PSKS	1 dok	27.680.000
	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	39,31	1.933.847.818
	Kegiatan Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	60 orang	246.503.093
	Kegiatan Fasilitasi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah peringatan hari besar nasional dan TMP	4 Keg dan 2 Paket	453.650.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	Jumlah Lembaga yang dibina	8 Lembaga	255.811.725
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin	Jumlah RTSM penerima Raskin/Rastra	130.080 orang	457.554.000
	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI -	Data BDT dan PBI-JKN	1 dok	520.559.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	JKN			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	4,55	2.042.751.450
	Kegiatan Fasilitasi dan Penanganan Korban Bencana Alam	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	6000 orang	550.150.000
	Kegiatan Fasilitasi dan Penanganan Korban Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang dibantu	72 orang	213.558.900
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PPKH kabupaten yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH	234 orang	808.929.250
	Kegiatan Pengelolaan Rumah Singgah bagi Pendamping Penderita Rujukan Keluarga Miskin	Jumlah Hunian Penderita yang dapat dit	3.650 orang	470.113.300
	Program Pelayanan Administrasi Dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pekantoran	100	573.997.460
	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	2000 surat	331.234.580
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik ,Air,dan Komunikasi	12 bulan	
		Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	18 unit	
		Jumlah Tenaga Kebersihan	1 paket	
		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	84 orang	
		Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis	14 bulan	
		Cakupan pemenuhan bahan bacaan	730 eksamplar	
	Kegiatan Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	12 Paket	104.328.380
		Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 Paket	
		Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	2 bh	
		Jumlah barang cetakan	12 paket	
		Jumlah barang penggandaan	22.201 lbr	
		Jumlah komponen instalasi listrik	12 bulan	
		Jumlah alat kebersihan yang disediakan	12 bulan	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	22 kali	138.434.500
		Jumlah koordinasi luar	39 kali	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		daerah		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pekantoran	100	382.595.095
	Kegiatan Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	104.999.875
	Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 unit	136.621.550
	Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	3 Unit	140.973.670
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	
		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 unit	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	100	25.900.000
	Kegiatan Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	4 Orang	25.900.000
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Baik Dan Tepat Waktu	100	44.999.875
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 dok	15.000.000
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 Dokumen	14.999.875
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	1 dok	15.000.000
		Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	1 kali	
TOTAL				6.154.465.803

Pada Tahun 2020 Dinas Sosial akan melaksanakan Urusan Sosial dengan total anggaran Rp. 9.344.744.665,00 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.190.278.862,00 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp. 6.154.465.803,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 7 program dan 24 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Sampang.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **““Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”**

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Dinas Sosial adalah **“Menurunnya Jumlah PMKS”** yang didukung oleh sasaran yaitu: **Menurunnya Jumlah PMKS.**

Pada Tahun 2020 Dinas Sosial akan melaksanakan Urusan Sosial dengan total anggaran Rp. 9.344.744.665,00 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.190.278.862,00 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp. 6.154.465.803,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 7 program dan 24 kegiatan.** Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2020, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Sosial Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;

3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI